



LAPORAN DATA INFORMASI TAHUN 2022



 Jalan Adi Sucipto (Komplek Transito) Nomor 284, Pekanbaru, Riau
 set.riau@bawaslu.go.id
 0761 7415288

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KATA PENGANTAR

Dalam hal pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau, kami berupaya untuk terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam mencapai misi sebagai lembaga pengawas pemilu yang terpercaya, dengan melaksanakan point ke empat visi Bawaslu yaitu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi selama tahun 2022 akan menjadi catatan penting bagi kami sendiri dalam melakukan perbaikan management, pengembangan, dan pengaplikasian sistem informasi yang telah dibangun di lingkungan Bawaslu. Sebagai divisi yang mengordinasikan data dan informasi di Bawaslu Provinsi Riau, kami berharap laporan ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk Bawaslu Republik Indonesia terutama Pusat Data Informasi (Pusdatin) dalam membuat kebijakan dan langkah startegis pada tahun 2023.

Kami menyadari masih banyak kekurangan selama melaksanakan tugas pengelolaan data informasi di Bawaslu Provinsi Riau, tapi hal itu akan menjadi motivasi untuk kami kedepannya. Bawaslu Terbuka Bawaslu Terpercaya.

Pekanbaru, 02 Maret 2023
Koordinator Divisi
Penindakan Pelanggaran, Data dan Informasi
Bawaslu Provinsi Riau,



Nanang Wartono, S.H., M.H.



DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG	2
A. Pelayanan Informasi.....	2
B. Penguatan Kapasitas	8
C. Pelaksanaan ePPID Terintegrasi	9
BAB III TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	10
A. Aplikasi	10
B. Website	10
BAB IV PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET	11
BAB V KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER	11
BAB VI PENGELOLAAN ANGGARAN.....	12
BAB VII TANTANGAN DAN PERMASALAHAN.....	13
BAB VIII REKOMENDASI	14
BABIX PENUTUP	14



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	2
Table 2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	3
Tabel 3 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan	6
Tabel 4 Sarana Permohonan Informasi Publik.....	7
Tabel 5 Statistik Pengunjung Website PPID Bawaslu Provinsi Riau	8
Tabel 6 Anggaran HHDI Bawaslu Riau Tahun 2022	12
Tabel 7 Anggaran Jaringan Internet tahun 2022	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik	9
---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pengelolaan Data dan Informasi di lingkungan Bawaslu pasca dibentuknya Pusat Data dan Informasi Bawaslu memiliki urgensi yang sangat jelas, pengelolaan data dan informasi difokuskan lebih mendalam kepada sistem informasi, aplikasi dan jaringan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Data Informasi, di Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan Pasal 82 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi bertugas melaksanakan urusan Hukum, Hubungan Masyarakat, pengelolaan data dan informasi, serta pelayanan informasi di provinsi.

Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Provinsi dikoordinasikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 4 huruf p Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Laporan akhir ini merupakan laporan hasil pengelolaan Data Informasi yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2022.



BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

A. Pelayanan Informasi

Sepanjang tahun 2022, jumlah permohonan informasi publik sebanyak 20 permohonan dan telah ditangani sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.

Waktu Permohonan	Jumlah Permohonan
Januari	1 (Satu) Permohonan
Februari	-
Maret	2 (Dua) Permohonan
April	3 (Tiga) Permohonan
Mei	1 (Satu) Permohonan
Juni	3 (Tiga) Permohonan
Juli	3 (Tiga) Permohonan
Agustus	2 (Dua) Permohonan
September	4 (Empat) Permohonan
Oktober	-
November	1 (Satu) Permohonan
Desember	-
Total	20 (Dua Puluh) Permohonan

Tabel 1– Jumlah Permohonan Informasi Publik



Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu pemenuhan informasi permohonan sebagaimana tersebut pada huruf A di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Informasi Yang Dimohon	Waktu Pemenuhan	Keterangan
1.	Data Visitor Website (Riau. Bawaslu.go.id) contoh, Press Release, Data DPT, TPS Tahun 2020	4 Hari	-
2.	Jumlah Tindak Pidana Pilkada 2020, Jumlah Tindak Pidana yang sampai Kepengadilan (Pilkada 2020), dan Jumlah Tindak yang	3 Hari	Data rekapan jumlah pelanggaran
3.	Data Pegawai Bawaslu Provinsi Riau	1 Hari	Tabel Jumlah Data Kepegawaian
4.	Polemik Kampanye dalam pelaksanaan pilkada dimana pandemi Covid-19 di Tahapan Pilkada 2020	2 Hari	Laporan pengawasan Pilkada tahun 2020
5.	Data Daftar Pemilih berkelanjutan Tahun 2020	2 Hari	Rekap Jumlah data Daftar Pemilih Berkelanjutan
6.	Data terkait pada Pemilihan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak di Provinsi Riau Tahun 2020	2 Hari	Laporan Pengawasan Pilkada 2020
7.	Data Pelanggaran Pemilu Serentak 2019	3 Hari	Rekap Jumlah Pelanggaran Pemilu 2019
8.	Perencanaan komunikasi bawaslu Provinsi Riau dengan mensosialisasikan E-PPID Tahun 2021	1 Hari	Wawancara



9.	Data perbandingan partisipasi pemilih pada pilkada riau tahun 2019 provinsi riau; data apa saja faktor faktor penghambat dalam partisipasi politik pada pemilihan serentak tahun 2019	1 Hari	Rekapan Data dan Laporan Pengawasan Pemilu 2019
10.	Data pengumuman hasil seleksi adm calon anggota bawaslu kabupaten siak masa jabatan 2018-2023; pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara calon anggota bawaslu kabupaten siak tahun 2018-2023	2 Hari	Pengumuman Hasil Seleksi
11.	Media sosial bawaslu provinsi riau	1 Hari	Daftar Media sosial Resmi Bawaslu Provinsi Riau
12.	Data Jumlah Permohonan Sengketa Pencalonan/Pencalegan di pemilu 2019 putusannya; data sengketa proses, sengketa pelanggaran administrasi di Pemilu 2019 dan putusannya; jumlah permohonan layanan informasi publik di bawaslu tahun 2019, 2020, dan 2021 kalau ada.	4 Hari	Rekapan jumlah data permohonan sengketa pada pemilu 2019, dan rekapan jumlah permohonan layanan informasi publik pada tahun 2019, 2020, dan 2021
13.	Daftar tabel perencanaan kegiatan bawaslu provinsi riau tahun 2021	1 Hari	
14.	Wawancara skripsi tentang pelaksanaan kampanye dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimasa pandemi covid-19 tahun 2020 provinsi riau	1 Hari	Wawancara



15.	Bagaimana tahapan pelaksanaan kampanye dimasa pandemi covid-19; jumlah data pelanggaran pada masa pandemi perkabupaten/kota seriau tahun 2020	1 Hari	Laporan Pengawasan Pilkada tahun 2020
16.	Data kepegawaian bawaslu provinsi riau, sarana dan prasarana bawaslu provinsi riau. (fasilitas sarana dan prasarana pada bawaslu provinsi riau); struktur organisasi penyelenggara pilkada tahun 2020 bawaslu provinsi riau	1 Hari	Rekap jumlah pegawai dan struktur pegawai Bawaslu Provinsi Riau tahun 2020
17.	Data pelanggaran pemilu di provinsi riau (ASN) tahun 2020 perkabupaten dan seprovinsi riau	3 Hari	Rekap jumlah data penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020
18.	Rekapan data penindakan temuan pelanggaran pemilu yang telah di tanda tangani se provinsi riau, kasus tindak lanjuti tahun 2020	1 Hari	Rekap jumlah data penanganan temuan pelanggaran pada Pilkada 2020
19.	Rekapan data penindakan temuan pelanggaran pemilu yang telah di tanda tangani se provinsi riau, kasus tindak lanjuti tahun 2020	4 Hari	Rekap jumlah data penanganan temuan pelanggaran pada Pilkada 2020
20.	Data lengkap LAKIP pada Bawaslu Provinsi Riau	1 Hari	Lakip Bawaslu Riau 2021

Tabel 2 – Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Adapun jumlah permohonan yang dikabulkan adalah dua puluh permohonan, sebagaimana rincian sebagai berikut :



No.	Informasi	Keterangan
1.	Data Visitor Website (Riau. Bawaslu.go.id) contoh, Press Release, Data DPT, TPS Tahun 2020	Dikabulkan
2.	Jumlah Tindak Pidana Pilkada 2020, Jumlah Tindak Pidana yang sampai Kepengadilan (Pilkada 2020), dan Jumlah Tindak yang tidak dilanjutkan, Fungsi Sentragakkumdu.	Dikabulkan
3.	Data Pegawai Bawaslu Provinsi Riau	Dikabulkan
4.	Polemik Kampanye dalam pelaksanaan pilkada dimana pandemi Covid-19 di Tahapan Pilkada 2020	Dikabulkan
5.	Data Daftar Pemilih berkelanjutan Tahun 2020	Dikabulkan
6.	Data terkait pada Pemilihan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak di Provinsi Riau Tahun 2020	Dikabulkan
7.	Data Pelanggaran Pemilu Serentak 2019	Dikabulkan
8.	Perencanaan komunikasi bawaslu Provinsi Riau dengan mensosialisasikan E-PPID Tahun 2021	Dikabulkan
9.	Data perbandingan partisipasi pemilih pada pilkada riau tahun 2019 provinsi riau; data apa saja faktor faktor penghambat dalam partisipasi politik pada pemilihan serentak tahun 2019	Dikabulkan
10.	Data pengumuman hasil seleksi adm calon anggota bawaslu kabupaten siak masa jabatan 2018-2023; pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara calon anggota bawaslu kabupaten siak tahun 2018-2023	Dikabulkan
11.	Media sosial bawaslu provinsi riau	Dikabulkan
12.	Data Jumlah Permohonan Sengketa Pencalonan/Pencalegan di pemilu 2019 putusannya; data sengketa proses, sengketa pelanggaran administrasi di Pemilu 2019 dan putusannya; jumlah permohonan layanan informasi publik di bawaslu tahun 2019, 2020, dan 2021.	Dikabulkan
13.	Daftar tabel perencanaan kegiatan bawaslu provinsi riau tahun 2021	Dikabulkan



14.	Wawancara skripsi tentang pelaksanaan kampanye dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimasa pandemi covid-19 tahun 2020 provinsi riau	Dikabulkan
15.	Bagaimana tahapan pelaksanaan kampanye dimasa pandemi covid-19; jumlah data pelanggaran pada masa pandemi perkabupaten/kota seriau tahun 2020	Dikabulkan
16.	Data kepegawaian bawaslu provinsi riau, sarana dan prasarana bawaslu provinsi riau. (fasilitas sarana dan prasarana pada bawaslu provinsi riau); struktur organisasi penyelenggara pilkada tahun 2020 bawaslu provinsi riau	Dikabulkan
17.	Data pelanggaran pemilu di provinsi riau (ASN) tahun 2020 perkabupaten dan seprovinsi riau	Dikabulkan
18.	Rekapan data penindakan temuan pelanggaran pemilu yang telah di tanda tangani se provinsi riau, kasus tindak lanjuti tahun 2020	Dikabulkan
19.	Rekapan data penindakan temuan pelanggaran pemilu yang telah di tanda tangani se provinsi riau, kasus tindak lanjuti tahun 2020	Dikabulkan
20.	Data lengkap LAKIP pada Bawaslu Provinsi Riau	Dikabulkan

Tabel 3 – Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang pelaksanaan pelayanan dan permohonan informasi publik tahun 2022, tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

Sarana Permintaan Informasi Publik

Pelayanan Informasi di PPID Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 terdapat 17 (tujuh belas) permohonan informasi yang dimohonkan secara langsung ke desk informasi PPID Bawaslu Provinsi Riau, dan 3 (tiga) permohonan informasi melalui system e-PPID di website PPID Bawaslu Provinsi Riau.

No.	Sarana Permohonan	Jumlah
1.	Permohonan Langsung ke Desk Informasi	17

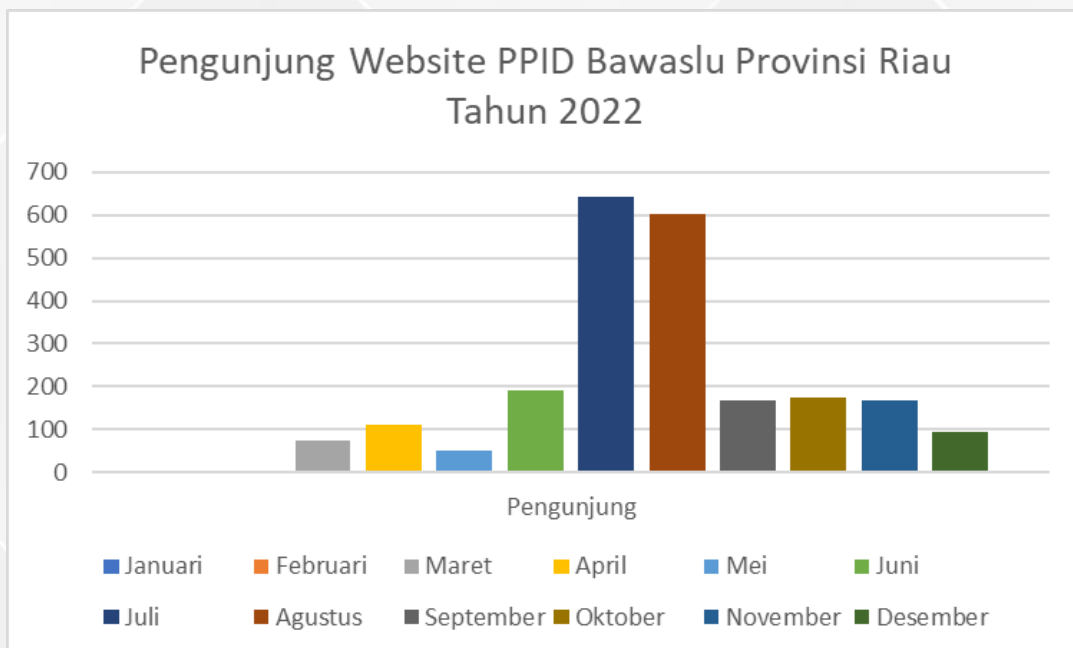


2.	Permohonan melalui website (e-PPID)	3
3.	Permohonan melalui email	0
4.	Permohonan melalui telepon	0
5.	Permohonan melalui hotline	0
Jumlah		20

Tabel 4– Sarana Permintaan Informasi Publik

Data Statistik Pengakses Website PPID Bawaslu Provinsi Riau

Pada tahun 2022, website PPID Bawaslu Provinsi telah di akses oleh 2.273 Pengunjung, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5-Statistik Pengunjung Website PPID Bawaslu Provinsi Riau

B. Penguatan Kapasitas

Dalam hal penguatan kapasitas pengelolaan data dan informasi dilingkungan Bawaslu Provinsi Riau, pada tahun 2022 Bawaslu Provinsi Riau melakukan kegiatan **Rapat Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu kabupaten Kota**

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan informasi publik. Pada Kamis, 28 Juli 2022 Bawaslu Riau melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Pengelolaan Data dan Informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Puadi, S.Pd., MM selaku Koordinator Divisi

Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Republik Indonesia membuka kegiatan secara resmi melalui dalam jaringan (daring). Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI. Dr. Bachtiar, SH.MH. dan Tim PPID Bawaslu Republik Indonesia hadir langsung pada kegiatan ini yang dilaksanakan di Aula Bawaslu Provinsi Riau. Selain itu, H. Asril Darma, S.SI., M.I.Kom Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau turut hadir sebagai Narasumber. Peserta kegiatan terdiri dari Koordinator Divisi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.



Gambar 1-Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik

C. Pelaksanaan ePPID Terintegrasi

Bahwa selama tahun 2022, Bawaslu Provinsi Riau menggunakan PPID terintegrasi versi pertama, karena pada pelaksanaan aplikasi ePPID Terintegrasi tahun 2022, Bawaslu Provinsi Riau tidak termasuk sebagai provinsi pada gelombang pertama.

Selama tahun 2022, terdapat 3 permohonan dari 20 permohonan informasi yang dimohonkan secara online menggunakan aplikasi PPID versi pertama.

BAB III

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Aplikasi

Pada tahun 2022 Bawaslu Provinsi Riau tidak membangun aplikasi apapun, dan dalam pelaksanaan menjalankan amanat regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Bawaslu Provinsi Riau telah berkomitmen untuk mendukung seluruh aplikasi yang dibangun oleh Bawaslu Republik Indonesia, dan berperan aktif dalam pelaksanaan maupun memberikan masukan untuk perbaikan sistem informasi yang dijalankan dilingkungan Bawaslu.

B. Website

Bawaslu Provinsi Riau mengelola dua website, yaitu Website Utama (riau.bawaslu.go.id) dan website PPID Bawaslu Riau (ppid.riau.bawaslu.go.id). pada pelaksanaan pengelolaan website, masih dikelola oleh staf Bawaslu Provinsi Riau. Namun, pada tahun 2022 Bawaslu Provinsi Riau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan website PPID Bawaslu Provinsi Riau, agar bisa digunakan lebih efektif dan efisien.

Seluruh website yang ada di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menggunakan CMS (*Content Management System*) wordpress. Sebagian besar masih menggunakan yang gratis, sehingga memiliki keterbatasan dalam mengoptimalkan website sebagai wadah publikasi Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini juga berpengaruh terhadap keamanan siber website Bawaslu Kabupaten/Kota.



BAB IV

PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET

Pemeliharaan jaringan dan internet dilingkungan Bawaslu Provinsi Riau, baik itu kantor Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau menggunakan provider indiehome, pengelolaan data dan informasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak sama dengan Bawaslu Republik Indonesia yang sudah termanajemen dengan baik, bahkan memiliki Pusat Data dan Informasi yang telah memiliki peta kerja yang jelas dengan pembagian 3 (tiga) sub didalamnya, sedangkan di Provinsi pengelolaan data informasi hanya dalam satu sub yang juga bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Jaringan internat kantor yang digunakan langsung dikelola oleh teknisi provider, dalam hal penganggaran dan pembayaran dilakukan oleh bagian administrasi karena masuk dalam belanja keperluan kantor yang dikelola oleh Bagian Administrasi, sehingga sampai saat ini pemeliharaan jaringan tidak berlaku khusus, sesuai dengan layanan yang diberikan oleh provider. Hal ini juga terjadi di Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB V

KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER

Pada tahun 2022, terdapat beberapa kasus website Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota disusupi konten judi online, bahkan ada website Kabupaten/Kota yang pernah di *hack* atau di retas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi peretasan yang terjadi tidak terlalu buruk, karena masih bisa dilakukan pengamanan sederhana dengan cara memulihkan akun dan penggantian password oleh admin website Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Provinsi Riau melalui staf data dan informasi, membuat group khusus staf atau admin website Bawaslu Kabupaten/Kota, didalam group ini dilakukan pemantauan secara berkala terkait informasi keamanan website, dan setiap minggu dilakukan pengecekan secara berkala, dan merubah password admin website secara berkala.



BAB VI
PENGELOLAAN ANGGARAN

Dalam hal pengelolaan anggaran, Bawaslu Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran untuk Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi. Pengalokasian anggaran tersebut, terbagi untuk tiga sub, untuk pengelolaan dan pelayanan data informasi, Bawaslu Provinsi Riau telah menganggarkan :

Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Riau		
No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau	Rp. 6.498.000,-
2.	Rapat Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu	Rp. 7.048.000,-
3.	Pengembangan dan Pemeliharaan Website PPID Bawaslu Provinsi Riau	Rp. 20.000.000,-
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Informasi	Rp. 35.470.000
5.	Perjalanan Dinas (Supervisi/Monitoring/Undangan)	Rp. 21.210.000,-
Total Anggaran		Rp. 90.226.000,-

Tabel 6-Anggara Bagian HHDI Bawaslu Riau

Anggaran Jaringan Internet Tahun 2022 (bagian Administrasi)		
No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Belanja Keperluan Kantor : Langganan Internet	Rp. 50.400.000
Total Anggaran		Rp.50.400.000-

Tabel 7-Anggaran Jaringan Internet 2022

Dalam hal langganan internet, anggaran dikelola oleh Bagian Administrasi karena ini merupakan bagian dai keperluan kantor, sehingga sampai saat ini terkait pengelolaan



jaringan dan internet tidak sepenuhnya dikelola oleh bagian yang membidangi Data Informasi.

BAB VII

TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

Tantangan yang dihadapi oleh Bagian yang membidangi Data Informasi Bawaslu Provinsi Riau adalah masih belum jelasnya peta kerja dari pengelolaan dan pelayanan data informasi ditingkat Bawaslu Provinsi, hal ini terbukti dengan belum adanya regulasi yang menjabarkan tugas, kewajiban dan fungsi dalam pengelolaan data informasi di tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dilihat dari Perbawaslu 1 tahun 2021 dan Perbawaslu 3 tahun 2022 tidak ada regulasi yang menjabarkan secara jelas bagaimana pengelolaan data informasi, hanya diatur tentang siapa yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pelayanan data informasi, tapi tidak memberikan gambaran apa yang harus dilakukan, batasan pengelolaan data informasi. Sehingga hal ini menjadi sangat abstrak untuk diterapkan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Contoh yang paling sederhana, hingga saat ini masih terdapat dualisme sudut pandang dalam hal pengelolaan website lembaga, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan website dikelola oleh bagian yang membidangi kehumasan atau bagian yang membidangi data informasi. Terutama ditingkat Kabupaten/Kota, memiliki banyak perbedaan dengan type Kabupaten/Kota, ada yang memiliki 5 Anggota, dan ada yang 3 Anggota. Seharusnya hal ini bisa diperjelas didalam regulasi. Mengingat pentingnya peran pengelolaan dan pelayanan data informasi, seharusnya mampu dijabarkan lebih detail.

Selain itu, permasalahan yang dihadapi baik oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota adalah permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari kuantitas SDM maupun kualitasnya. Kemudian terkait dengan anggaran, masih perlu penambahan anggaran dalam hal pengelolaan dan pelayanan data informasi.



BAB VIII

REKOMENDASI

Berdasarkan tantangan dan permasalahan diatas, Bawaslu Provinsi Riau merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlunya dibentuk suatu regulasi (Perbawaslu) yang mengatur dan menjabarkan kewenangan, tugas, fungsi dan kewajiban dalam pengelolaan data informasi dilingkungan Bawaslu;
2. Mengingat Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu Republik Indonesia baru dibentuk, perlu dilakukan *Forum Group Discussion* (FGD) dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berkala, untuk memperkuat pengembangan peran Pusdatin dan peran pengelolaan data di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Perlu dilakukannya pelatihan khusus untuk staf data dalam hal keamanan siber dilingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Dalam hal penganggaran, perlunya dukungan Bawaslu RI tentang penganggaran dukungan operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

BAB IX

PENUTUP

Demikianlah laporan ini kami buat, semoga laporan ini menjadi bahan pertimbangan Bawaslu Republik Indonesia dan Pusat Data Informasi (Pusdatin) dalam membuat kebijakan, dan mengambil langkah strategis untuk melaksanakan tugas pengelolaan data informasi dilingkungan Bawaslu.

